Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page 10541-10547

Integrasi Dan Akuntabilitas Sebagai Good Governance Dalam Administrasi Pemerintahan Daerah Di Sumatera Utara

Tamaulina Br.sembiring[1], Dwi Novitria[2] , Jessica Cristiana Siahaan[3] ,Dela Rianti[4] ,Hantor Sitorus[5], M.Homayun lubis[6]
[1,2,3,4,5,6] **Universitas Pembangunan Panca Budi Medan**
Corresponding Author: Tamaulina Br.sembiring, e-mail: tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

Published: July, 2025

ABSTRAK

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum. Dalam konteks pemerintahan daerah, good governance menjadi landasan utama untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan berkelanjutan. Dua prinsip utama yang sangat menentukan keberhasilan implementasi good governance adalah integrasi dan akuntabilitas. Integrasi merujuk pada keselarasan antara kebijakan, lembaga, dan program di berbagai tingkatan pemerintahan, sementara akuntabilitas mencerminkan kewajiban aparat pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kedua prinsip tersebut diimplementasikan dalam administrasi pemerintahan daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang mengacu pada literatur akademik dan praktik pemerintahan daerah. Diharapkan, melalui penerapan integrasi dan akuntabilitas yang optimal, pemerintahan daerah di Sumatera Utara dapat membangun sistem birokrasi yang lebih responsif, efisien, dan terpercaya.

Kata Kunci: good governance, integrasi, akuntabilitas, pemerintahan daerah,Sumatera utara

ABSTRACT

Good governance is a concept of government administration that emphasizes transparency, participation, accountability, effectiveness, and the rule of law. In the context of regional government, good governance is the primary foundation for achieving quality public services and sustainable development. Two key principles that determine the success of good governance implementation are integration and accountability. Integration refers to the alignment of policies, institutions, and programs at various levels of government, while accountability reflects the obligation of government officials to be accountable for their actions and policies. This article aims to explain how these two principles are implemented in regional government administration, specifically in North Sumatra Province. This research uses a descriptive-qualitative approach that draws on academic literature and regional government practice. It is hoped that through optimal implementation of integration and accountability, regional governments in North Sumatra can build a more responsive, efficient, and trustworthy bureaucratic system.

Keywords: good governance, integration, accountability, regional government, North Sumatra

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Sejak era reformasi, Indonesia telah menekankan pentingnya good governance sebagai kerangka tata kelola pemerintahan yang ideal. Good governance tidak hanya menjadi tuntutan hukum internasional dan nasional, tetapi juga menjadi kebutuhan untuk menjawab tantangan kompleksitas pelayanan publik, desentralisasi, serta meningkatnya partisipasi masyarakat. Pemerintahan daerah sebagai perpanjangan

tangan dari negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi administrasi yang baik dan bertanggung jawab.

Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemui permasalahan seperti tumpang tindih kewenangan antarinstansi, kurangnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan, serta lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kinerja. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Di antara delapan prinsip good governance versi UNDP, integrasi dan akuntabilitas memegang peranan kunci. Integrasi diperlukan untuk menyatukan berbagai sektor dan lapisan pemerintahan agar bekerja secara selaras dalam mencapai tujuan pembangunan. Akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik dan lembaga pengawas**.**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana konsep dan implementasi prinsip integrasi dalam administrasi pemerintahan daerah?
2. Bagaimana bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan daerah?
3. Apa tantangan utama dalam menerapkan integrasi dan akuntabilitas di tingkat pemerintah daerah, serta bagaimana solusi implementatifnya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai implementasi prinsip integrasi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Utara. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1. Studi Kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai sumber literatur akademik seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi dari lembaga pemerintahan.
2. Dokumentasi, yaitu dengan mengkaji dokumen kebijakan daerah seperti RPJMD, LAKIP, dan laporan pengawasan internal.
3. Analisis Konten, yang digunakan untuk mengkaji praktik-praktik good governance dari sisi integrasi dan akuntabilitas yang telah atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, terutama dalam konteks digitalisasi pemerintahan.

Analisis dilakukan secara interpretatif dengan menghubungkan data dari berbagai sumber, baik teoritis maupun empiris, untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap permasalahan dan solusi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Integrasi dalam Administrasi Pemerintahan Daerah adalah Integrasi dalam administrasi pemerintahan daerah adalah penyatuan dan penyelarasan kebijakan, program, data, dan layanan antar

instansi di lingkungan pemerintah daerah, serta antara daerah dan pusat. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun Prinsip-Prinsip Integrasi Konsistensi kebijakan antar dokumen perencanaan,Koordinasi lintas sektor dan Lembaga,Kolaborasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan,Interoperabilitas sistem informasi dan data.

a. Implementasi Integrasi dalam Pemerintahan Daerah

Beberapa bentuk implementasi :

1) Sistem Informasi Pemerintahan Terpadu Contoh: SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dari Kemendagri.
2) Dokumen Perencanaan Terintegrasi RPJMD selaras dengan RPJMN; Renstra OPD harus mendukung visi kepala daerah.
3) Musrenbang TerpaduW Forum lintas sektor dari desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi untuk sinkronisasi program.
4) Layanan Publik Terintegrasi Mal Pelayanan Publik dan Online Single Submission (OSS) yang mengintegrasikan banyak layanan lintas sektor dalam satu tempat.
5) SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemanfaatan teknologi untuk integrasi proses layanan, pelaporan, hingga evaluasi.
6) Penguatan Sistem dan Regulasi Penegakan regulasi terkait integrasi perencanaan (Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD).Penyusunan Perda yang mendorong integrasi data dan layanan publik.
7) Peningkatan Kapasitas SDM Pelatihan ASN dalam hal perencanaan terpadu, pengelolaan sistem informasi, dan evaluasi berbasis kinerja.
8) Digitalisasi dan Interoperabilitas Pemanfaatan platform digital seperti SPBE, SIPD, dan e-Government yang saling terhubung.
9) Koordinasi dan Kolaborasi Antarlembaga Forum koordinasi OPD secara rutin.Integrasi antara OPD teknis, Bappeda, dan Inspektorat untuk sinkronisasi perencanaan-penganggaran.
10) Monitoring dan Evaluasi Terpadu Penerapan dashboard monitoring kinerja OPD. Audit kinerja berbasis output dan dampak, bukan hanya serapan anggaran.

2. Bentuk Akuntabilitas dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan daerah adalah kemampuan dan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, kewenangan, dan penggunaan sumber daya publik secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga pengawas.

b. Bentuk Akuntabilitas:

1) Akuntabilitas Kinerja Diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**.** Disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**.** Menekankan pada hasil (output dan outcome), bukan hanya kegiatan (input dan proses).
2) Akuntabilitas Keuangan Dilaksanakan melalui Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah, Laporan Keuangan Daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3) Akuntabilitas Politik Pemerintah daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah kepada DPRD, Berkoordinasi dengan DPRD dalam pengawasan dan penganggaran.
4) Akuntabilitas Publik Diterapkan melalui,Keterbukaan informasi publik (UU No. 14 Tahun 2008),Pelibatan masyarakat dalam Musrenbang,Layanan pengaduan publik (contoh: SP4N-LAPOR!).

Masalah yang Dihadapi:

1. Minimnya budaya akuntabilitas di lingkungan birokrasi daerah.
2. Rendahnya kualitas pelaporan kinerja, yang masih administratif dan tidak berbasis hasil.
3. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.
4. Terbatasnya kapasitas SDM dan penguasaan sistem elektronik.
5. Tumpang tindih peraturan dan lemahnya pengawasan internal.
   a. Penguatan Sistem dan Regulasi Mendorong penerapan SAKIP secara konsisten di seluruh OPD.Harmonisasi regulasi daerah dengan pusat agar pelaporan tidak tumpang tindih.
   b. Peningkatan Kapasitas SDM Pelatihan teknis terkait perencanaan berbasis hasil, penyusunan indikator kinerja, dan manajemen risiko.
   c. Digitalisasi Akuntabilitas Penggunaan sistem terintegrasi seperti SIPD, e-LAKIP, Budgeting, dan e-Monev.

Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Mendorong keterbukaan data anggaran dan kinerja, Memfasilitasi akses publik terhadap pelaporan, evaluasi, dan pengaduan.

Reward and Punishment Pemberian Dana Insentif Daerah (DID) bagi pemerintah daerah dengan kinerja akuntabilitas baik,Penerapan sanksi administratif bagi pejabat yang lalai dalam pelaporan kinerja, Tantangan Utama dalam Menerapkan Integrasi dan Akuntabilitas di Pemerintah Daerah

Tantangan Integrasi Ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) OPD sering berjalan sendiri tanpa koordinasi atau integrasi program lintas sektor.

Tumpang tindih regulasi pusat dan daerah Inkonsistensi kebijakan menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan program.

Sistem informasi yang belum terintegrasi Banyak daerah menggunakan sistem yang berbeda-beda, menyebabkan duplikasi data dan sulitnya sinkronisasi.

Rendahnya kualitas perencanaan terpadu RPJMD sering tidak selaras dengan RPJMN atau prioritas nasional.

Tantangan Akuntabilitas

1. Minimnya transparansi dan partisipasi Masyarakat Masyarakat kurang terlibat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan.
2. Lemahnya sistem pengawasan internal Inspektorat daerah belum efektif mencegah penyimpangan anggaran.
3. Kurangnya pemahaman ASN terhadap sistem akuntabilitas kinerja Banyak aparatur hanya menyusun laporan formal, bukan berbasis hasil (outcome).
4. Terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan dan evaluasi Penggunaan aplikasi e-government masih rendah dan belum terstandar.

Solusi untuk Tantangan Integrasi

1. Penerapan Sistem Informasi Terpadu Implementasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) secara menyeluruh.
2. Koordinasi antar OPD secara berkala Pembentukan tim koordinasi lintas sektor untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
3. Sinkronisasi perencanaan pusat-daerah Integrasi RPJMD dengan RPJMN melalui mekanisme Musrenbang, Forum Konsultasi Publik, dan evaluasi RPJMD oleh Kemendagri.
4. Peningkatan kapasitas ASN dalam manajemen pemerintahan dan teknologi informasi.
5. Solusi untuk Tantangan Akuntabilitas Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pelatihan dan asistensi teknis penyusunan indikator kinerja dan LAKIP.
6. Optimalisasi fungsi pengawasan internal dan eksternal Memperkuat Inspektorat Daerah, memperluas peran BPK dan BPKP, serta keterlibatan DPRD.
7. Digitalisasi pelaporan dan pengawasan Penggunaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), e-LAKIP, dan e-Monev. Meningkatkan partisipasi publik melalui keterbukaan informasi Optimalisasi kanal pengaduan publik seperti SP4N-LAPOR!, website resmi daerah, dan media sosial.

Tantangan dalam menerapkan integrasi dan akuntabilitas di tingkat pemerintah daerah (pemda) sering kali bersifat struktural, kultural, dan teknis. Berikut penjelasan lengkap mengenai tantangan utama beserta solusi implementatif dan cara penyelesaiannya:

1. Solusi Implementatif dan Cara Penyelesaiannya
   a. Pembangunan Sistem Pemerintahan Terintegrasi Digital (e-Government)
      1) Solusi: Kembangkan sistem informasi daerah yang saling terkoneksi antar dinas (misal: SIPD, e-Planning, e-Budgeting).

2) Cara: Libatkan Bappeda, Diskominfo, dan tim IT untuk mengembangkan dashboard terpadu dengan akses publik.

b. Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program
   1) Solusi: Bentuk forum lintas sektoral rutin (seperti Rakor) untuk menyelaraskan visi dan program kerja.
   2) Cara: Jadwalkan pertemuan per triwulan antar-OPD, dan libatkan tokoh masyarakat serta legislatif.

c. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
   1) Solusi: Lakukan pelatihan berkala tentang good governance, integritas, dan akuntabilitas.
   2) Cara: Gandeng LAN, BPKP, dan LSM profesional untuk pelatihan dan sertifikasi ASN

KESIMPULAN

Integrasi dalam pemerintahan daerah merupakan upaya menyelaraskan kebijakan, program, dan sistem antarinstansi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Implementasinya melibatkan penggunaan sistem terpadu seperti SIPD dan SPBE, serta koordinasi lintas sektor.

Akuntabilitas mencakup aspek kinerja, keuangan, politik, dan publik. Penerapan akuntabilitas di daerah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari minimnya transparansi hingga lemahnya sistem pengawasan. Meski demikian, upaya seperti penerapan SAKIP, pelaporan digital, dan keterlibatan masyarakat terus ditingkatkan.

Tantangan struktural, kultural, dan teknis menjadi hambatan dalam penerapan integrasi dan akuntabilitas di tingkat daerah. Namun, solusi implementatif seperti e-Government, peningkatan SDM, dan penguatan koordinasi lintas sektor dapat mengoptimalkan prinsip good governance di lingkungan pemerintahan daerah.

Saran

1. Pemerintah daerah perlu mempercepat digitalisasi sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi untuk memperkuat koordinasi, transparansi, dan efisiensi birokrasi
2. Pelatihan dan penguatan kapasitas ASN harus dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman dan implementasi prinsip good governance, khususnya integrasi dan akuntabilitas, lebih optimal.
3. Partisipasi publik harus ditingkatkan melalui keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat dalam Musrenbang, serta penggunaan media aduan seperti SP4N-LAPOR untuk mendorong kontrol sosial yang efektif terhadap kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2020). Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Budiardjo, M. (2010). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kementerian Dalam Negeri. (2019). Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). Indeks Integritas Daerah.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Pratikno. (2008). Reformasi Administrasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI Press.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document